

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Munculnya fenomena banyaknya partai sekarang ini merupakan akibat dari pergeseran cara pandang politisi dalam memahami peran sosial Partai Politik bukan lagi dihayati sebagai partai perjuangan, karena begitu banyak kepentingan pribadi kelompok harus diagendakan. Akibatnya terjadi pergeseran politik, dimana keputusan-keputusan politik yang berdampak pada kehidupan masyarakat itu bersumber pada tawar menawar yang berujung pada *money politic*. Ujung daei semua adalah munculnya privatisasi kekuasaan. Dalam kehidupan politik saat ini kekuasaan negara yang harusnya menjadi milik rakyat sepenuhnya terkikis menjadi milik beberapa orang yang memiliki akses besar. Dengan berbagai keputusan yang tidak sama sekali memihak rakyat, hanya menjadi sapi perah. Cita-cita reformasi yang menjadi titik awal perubahan untuk membangun kepentingan rakyat menjadi hilang begitu saja.

Pada era orde baru masyarakat mengetahui partai politik hanya sebagai organisasi politik saja dan juga sebaliknya partai politik melakukan perannya pada masyarakat hanya sebatas saat akan pemilihan umum saja yaitu dengan menarik simpati massa untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.

Dengan dilatarbelakangi banyaknya krisis multi dimensi yang merupakan peninggalan era orde baru diperlukan sebuah tatanan sistem politik yang lebih baik yang mempunyai tujuan memperjuangkan aspirasi rakyat bukan sistem *eksploitasi* yang memperlak rakyat. Pada dasarnya berlangsung “*bargaining rational*” antara aktor yang terlibat didalamnya.<sup>1</sup>

Sampai hari ini demokrasi masih dianggap sebagai cara untuk membuat dan melaksanakan kebijakan-kebijakan<sup>2</sup> Negara demokratis adalah merupakan negara yang digerakkan oleh nilai-nilai demokrasi sedangkan demokratisasi antara lain menunjuk pada adopsi nilai-nilai “*Free and Fair Election Government*”<sup>3</sup>

Pada Pemilu 1999 partai-partai yang ikut didalamnya sangat banyak yaitu 48 partai dimana partai tersebut menjamur setelah jatuhnya rezim orde baru yang kemudian muncul orde reformasi. Pemilu 2004 partai politik peserta pemilu lebih sedikit menjadi 24 partai. Padahal pada era sebelum 1999 hanya ada dominasi *Triple Party* yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Dari ketiga partai itu Golongan Karya yang satu-satunya bukan sebuah partai namun mengatasnamakan golongan sangat dominan selama rezim orde baru

---

<sup>1</sup>Mochtar Mas'od, *Negara Kapita Demokrasi* Pustaka Pelajar Yogyakarta 1994 hal 13

<sup>2</sup>O'Donnel & Schmitter dalam bukunya *Transisi Menuju Demokrasi Rangkaian Kemungkinan Dan Ketidakpastian* LP3S 1993 hal 8

<sup>3</sup>Robert Bartley DKK, *Democracy & Capitalisme Asian And America Perspective*, (Institute of Shouthes Theat Asian Studiet), 1994

berkuasa. Golkar merupakan kepanjangan tangan dari pemerintahan saat itu. Akan tetapi dalam perkembangannya pada Pemilu 1999 Golkar sedikit goyah walaupun masuk dalam kategori 3 partai besar. Namun dalam Pemilu 2004 Golkar kembali menjadi partai pemenang pemilu. Munculnya multi partai tidak otomatis membawa optimisme bagi masyarakat. Mungkin sebaliknya Masyarakat akan cenderung apatis dan pesimis. Sikap apatis dan pesimis muncul karena semakin tingginya krisis kepercayaan terhadap partai politik.

Partai Amanat Nasional (PAN) yang didirikan oleh Amien Rais yang pada waktu itu adalah seorang tokoh reformasi yang begitu lantang meneriakkan suksesi kepemimpinan untuk melengserkan Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun. PAN diyakini dapat sebagai kekuatan alternatif. Ada tiga alasan argumentasi untuk memperkuat keyakinan bahwa PAN mampu mengatasi krisis multi dimensi. *Pertama*, secara komitmen ideologis, PAN dapat diharapkan komitmen perjuangannya. Gagasan tentang pluralisme dan tidak berdasar ideologi tertentu maka PAN lebih lugas, terbuka, artikulatif dan demokratis dalam merumuskan dan mengajukan agenda tuntutan dan keprihatinan masyarakat yang tidak terakomodasi dalam saluran resmi kekuasaan. *Kedua*, PAN dengan bentuk kelembagaan yang khas yaitu partai inklusif dan lintas etnis dapat menjadi wahanamediasi penghubung yang efektif antar berbagai kepentingan di masyarakat<sup>4</sup> Atau PAN bisa berfungsi

---

<sup>4</sup>Wawancara *Liddle*, Gatra 5 september 1998

sebagai sarana artikulasi kepentingan rakyat dalam sistem politik. *Ketiga* secara kapasitas figur organisasi tak bisa dipungkiri bahwa PAN dengan Prof. Dr. H.M. Amien Rais melalui gagasan, pendapat, dan seruannya dapat mengangkat agenda keprihatinan masyarakat menjadi opini publik yang luas. Agenda keprihatinan masyarakat yang semula terbatas pada lingkup lokal dan domestik dengan kekuatan “figur” PAN, agenda tersebut dapat menjadi agenda internasionalnya.<sup>5</sup>

PAN pasca Amien Rais yang saat ini dipimpin oleh Soetrisno Bachir sebagai Ketua Umum seperti mengalami kehilangan roh reformis dan perjuangan ke arah perubahan yang dulu pada awal berdirinya menjadi isu strategis untuk menarik ribuan simpatisan. Amien Rais tidak menginginkan partai yang didirikannya tergantung pada satu figur. Seperti halnya PKB yang tergantung figur Gus Dur dan PDIP yang juga sangat tergantung dengan figur Megawati Soekarnoputri. Amien Rais yang sekarang menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) DPP PAN berharap PAN yang didirikannya bisa menjadi partai yang besar pada waktu mendatang. Namun dalam perjalanannya ternyata figur seorang Soetrisno Bachir belum begitu dikenal oleh para kader dan simpatisan di tingkat daerah. Sehingga Soetrisno Bachir yang lebih akrab dipanggil SB ini melakukan iklan secara personal di media cetak maupun elektronik yang justru iklan tersebut menjadi kontra

---

<sup>5</sup>Amien Rais, *Intervensi Moral Amien Rais*, Kompas 26 Maret 1999

produktif dengan PAN, karena dengan slogan “Hidup Adalah Perbuatan” yang terasa asing dan “berat” menjadi olok-olok baik di dalam internal partai maupun eksternal partai dalam hal ini kompetitor dari partai lain. Dan seringkali arah PAN yang digagas oleh Soetrisno Bachir sebagai ketua umum ini tidak sejalan dengan pemikiran Amien Rais yang merupakan Ketua MPP DPP PAN. Masih berlakunya politik tokoh, artinya peran kharisma tokoh-tokoh dalam partai politik yang akan memupus sikap kritis masyarakat terhadap beberapa partai politik besar yang mengandalkan tokoh. Pola hubungan *patron client* yang mengakar kuat dalam masyarakat.

PAN yang lahir secara tidak langsung dibidani oleh Muhammadiyah melalui Sidang Tanwir Muhammadiyah 1998 di Semarang, sampai saat ini masih mengandalkan warga Muhammadiyah sebagai basis massanya. Juga ketika dikaitkan dengan "suasana psikologis" pada sejarah awalnya, berdirinya PAN memang tidak bisa lepas dari Amien Rais. Sedangkan posisi Amien Rais tidak bisa lepas dari Muhammadiyah. Seperti pernah diungkapkan Amien Rais sendiri, tanpa seizin Muhammadiyah, sebagai ketua Muhammadiyah dia tidak mungkin bisa memimpin PAN. Artinya, tak sepenuhnya salah jika ada yang berpendapat bahwa, jika NU yang melahirkan PKB, maka Muhammadiyah adalah yang melahirkan PAN. Ilustrasi ini menunjukkan betapa keberadaan PAN tidak bisa dilepaskan dari

Muhammadiyah. Apalagi, secara simbolis pun ada kesamaan, seperti tercermin dalam lambangnya yang sama-sama gambar matahari.<sup>6</sup>

Namun yang mengagetkan dalam dua kali pemilu yaitu 1999 dan 2004 kedudukan PAN tidaklah begitu menyenangkan. Pada Pemilu 1999 PAN menduduki peringkat 5 (lima) sedangkan Pemilu 2004 posisi PAN menurun di peringkat 6 (enam). Ternyata para warga Muhammadiyah tidak merasa yakin bahwa mereka harus memilih PAN. Disamping itu umat Islam diluar Muhammadiyah juga tidak banyak tertarik pada PAN, sehingga suara PAN tidak begitu besar.

Pada tahun 1999 PAN mulai mengikuti pemilu yang pertama kalinya, kembali mengikuti pemilu pada tahun 2004, dengan perolehan suara yang cukup besar dan terus mengalami peningkatan, akan tetapi belum mencapai pada tingkat memenangkan pemilu. Baik di tingkat nasional maupun ditingkat lokal kota, Namun pada pemilu 2009 kali ini PAN mengalami penurunan yang cukup drastis khususnya PAN di Kota Yogyakarta yang menjadi obyek penelitian ini.

Adapun perbandingan statistik perolehan suara enam besar pada pemilu 1999, 2004 dan pemilu 2009 secara nasional yaitu, sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Deni al Asy'ari, <http://pks-jogja.org/detail.php?ID=902&cat=Artikel>, 24-10-2008

**TABEL 1.1**  
**REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA SAH PADA PEMILU 1999**

<b>No. Urut</b>	<b>Nama Partai Politik</b>	<b>Jumlah Suara</b>	<b>%</b>	<b>Jumlah Kursi</b>
1.	PDI P	36.689.073	33,76	153
2.	GOLKAR	23.741.749	22,46	120
3.	PPP	11.329.905	10,72	58
4.	PKB	13.336.982	12,62	51
<b>5.</b>	<b>PAN</b>	<b>7.528.956</b>	<b>7,12</b>	<b>34</b>
6.	PBB	2.049.708	1,94	13

*Sumber: Di olah dari data perolehan suara Pemilu 1999 KPU Pusat.*

**TABEL 1.2**  
**REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA SAH PADA PEMILU 2004**

<b>No. Urut</b>	<b>Nama Partai Politik</b>	<b>Jumlah Suara</b>	<b>%</b>	<b>Jumlah Kursi</b>
1.	GOLKAR	24.480.757	21,58	128
2.	PDI P	21.026.629	18,53	109
3.	PPP	9.248.764	8,15	58
4.	Demokrat	8.455.225	7,45	57
5.	PKB	11.989.564	10,57	52
<b>6.</b>	<b>PAN</b>	<b>7.303.324</b>	<b>6,44</b>	<b>52</b>

*Sumber: Di olah dari data perolehan suara Pemilu 2004 KPU Pusat.*

**TABEL 1.3**  
**REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA SAH PADA PEMILU 2009**

No. Urut	Nama Partai Politik	Jumlah Suara	%	Jumlah Kursi
1.	Partai Demokrat	21.703.137	20,85	148
2.	Partai Golkar	15.037.757	14,45	108
3.	PDI P	14.600.091	14,03	93
4.	PKS	6.206.955	7,88	59
<b>5.</b>	<b>PAN</b>	<b>6.254.580</b>	<b>6.01</b>	<b>42</b>

*Sumber: Di olah dari data perolehan suara Pemilu 2009 KPU Pusat.*

Dari perbandingan perolehan suara PAN pada pemilu 1999, 2004 dan 2009 diatas, pada pemilu yang pertama PAN dapat menduduki peringkat lima besar perolehan suara terbanyak setelah PDI P, Golkar, PPP, PKB, dengan perolehan kursi legislatif, yaitu 34 kursi. Pada pemilu 2004, PAN memang mengalami penurunan perolehan suara sebesar 225.632 (068 %) suara dengan menduduki peringkat keenam. Akan tetapi PAN mengalami peningkatan perolehan jumlah kursi, dari 34 kursi pada pemilu 1999 menjadi 52 kursi pada pemilu 2004. Sedangkan pada pemilu 2009 dengan perolehan suara sebesar 6.254.580 (6.01 %) PAN mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu suara sebesar 1.048.744 (0,43%) perolehan kursi di tingkat DPR pun juga mengalami penurunan yang cukup banyak dari 52 kursi menjadi 42 kursi..

Sedangkan perbandingan statistik perolehan suara enam besar pada pemilu 1999 dan 2004 di lokal Propinsi DIY yaitu, sebagai berikut:

**TABEL 1.4**  
**PEROLEHAN SUARA ENAM BESAR PADA PEMILU 1999**

No.	Nama	Kota	Bantul	Sleman	GK	KP	Jumlah	%
1.	PDI P	97.972	148.558	189.527	134.586	72.559	643.202	35,65
<b>2.</b>	<b>PAN</b>	<b>59.108</b>	80.063	100.832	38.152	33.464	311.619	17,27
3.	Golkar	27.438	52.850	61.762	79.797	36.898	258.745	14,34
4.	PKB	11.290	87.364	73.069	43.517	42.000	257.240	14,26
5.	PPP	12.430	25.138	27.601	12.131	10.565	87.865	4,87
6.	PK	4.467	6.290	10.609	2.624	3.818	27.808	1,54

*Sumber: Di olah dari data perolehan suara Pemilu 1999 KPUD DIY*

**TABEL 1.5**  
**PEROLEHAN SUARA LIMA BESAR PADA PEMILU 2004**

No.	Nama	Kota	Bantul	Sleman	GK	KP	Jumlah	%
1.	PDI P	59.758	151.336	104.288	99.839	49.840	465.061	26,30
<b>2.</b>	<b>PAN</b>	<b>52.848</b>	<b>80.218</b>	<b>99.216</b>	<b>56.761</b>	<b>39.197</b>	<b>328.240</b>	<b>18,57</b>
3.	Golkar	23.804	37.098	50.610	99.563	34.091	245.166	13,87
4.	PKB	6.539	54.655	47.644	3.136	16.372	183.097	10,36
5.	PKS	24.990	32.362	47.644	16.802	16.372	138.170	7,82

*Sumber: Di olah dari data perolehan suara Pemilu 2004 KPUD DIY*

**TABEL 1.6**  
**PEROLEHAN SUARA LIMA BESAR PADA PEMILU 2009**

No	Nama	Kota	Bantul	Sleman	GK	KP	Jumlah
1.	Demokrat	55,327	80,553	96,865	61,125	33,929	327,799
2.	PDI-P	38,409	79,910	70,708	58,174	27,478	274,679
3.	Golkar	15,265	65,487	80,968	66,473	30,607	258,800
<b>4.</b>	<b>PAN</b>	<b>26,738</b>	<b>62,860</b>	<b>58,187</b>	<b>59,787</b>	<b>35,844</b>	<b>243,416</b>
5.	PKS	20,347	40,449	56,470	21,610	20,256	159,132

*Sumber: Di olah dari data perolehan suara Pemilu 2009 DPW PAN DIY*

Dari ketiga tabel perolehan suara PAN pada Pemilu 1999 dan Pemilu 2004 di DIY, dapat dilihat bahwa terdapat perubahan persentase perolehan suara. Sekalipun urutan kedua masih diduduki oleh PAN, namun persentase perolehan suara PAN mengalami peningkatan, dari 17,27% menjadi 18,57% (meningkat sebanyak 1.3%). Dari satu kota dan empat kabupaten di DIY, PAN mengalami peningkatan suara yang cukup drastis ditiga kabupaten, yaitu Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, dan Kulon Progo. Sedangkan disatu kota dan kabupaten lainnya mengalami penurunan yang tidak begitu jauh dari angka sebelumnya, yaitu di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Namun pada pemilu 2009 perolehan suara PAN mengalami penurunan drastis dari pemilu sebelumnya. PAN melorot dari posisi dua menjadi peringkat empat dari jumlah perolehan suara mengalami penurunan sebesar 84.824 suara. Hasil yang cukup mencengangkan perolehan suara yang diperoleh PAN.

Berdasarkan data perolehan suara PAN pada pemilu 1999, 2004 dan pemilu 2009 tersebut, baik ditingkat nasional maupun tingkat lokal di DIY, maka peneliti tertarik untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan suara PAN, khususnya di Kota Yogyakarta pada pemilu 2009. Dimana PAN sebagai partai yang baru terlahir pada awal era reformasi, kemudian mengikuti pemilu 1999 dapat menduduki peringkat lima besar dengan perolehan 34 kursi di legislatif dan pemilu 2004 dapat menduduki peringkat enam besar dengan perolehan 52 kursi di legislatif. Sedangkan pada tingkat lokal di Kota Yogyakarta, PAN dapat menduduki peringkat dua setelah PDI P, dari pemilu 1999 dengan perolehan suara, yaitu 59.108 suara, dan pada pemilu 2004 memperoleh suara, yaitu 52.848 suara, Lalu pada pemilu 2009 PAN mengalami penurunan drastis dalam perolehan suara, menjadi 26,738 suara. Pada pemilu 2004 PAN mendapatkan 9 kursi legislatif di tingkat kota namun pada pemilu 2009 menurun drastis hanya mendapatkan 5 kursi.

Berdasarkan data perolehan suara PAN pada pemilu 1999 dan pemilu 2004 tersebut, baik ditingkat nasional maupun tingkat lokal di Kota Yogyakarta, maka peneliti tertarik untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan perolehan suara PAN, khususnya di Kota Yogyakarta, setelah melihat hasil perolehan suara pemilu 2009, PAN baru tersadar strategi partai tersebut tidak membawa keberhasilan peningkatan suara atau kursi di parlemen, justru PAN Kota Yogyakarta mengalami

penurunan drastis dan harus kehilangan 4 kursi dibanding pemilu 2004 yang lalu. Kemerosotan perolehan suara disebabkan banyak factor, ada 8 faktor antara lain yaitu kurang masivnya kaderisasi partai untuk membentuk kader dan caleg yang berkualitas serta populis dimata masyarakat, lemahnya konsolidasi internal, dan faktor kepemimpinan dalam hal ini krisis kepemimpinan di dalam PAN pasca Amien Rais sebagai ketua umum dan fenomena figur SBY yang begitu kuat.

Selain itu peneliti melihat dari segi kelahiran PAN, yang tidak terlepas dari peran Muhammadiyah yang cukup besar dalam melahirkan partai tersebut, bahkan ikut mensukseskan PAN pada pemilu 1999 dan 2004. Kota Yogyakarta yang merupakan ibukota Provinsi DIY sebagai tempat kelahiran Muhammadiyah yang sebagian besar masyarakatnya adalah warga Muhammadiyah, tentunya juga akan menjadi basis massa PAN baik ditingkat nasional maupun lokal di Kota Yogyakarta. Apalagi ditambah dengan kelahiran Partai Matahari Bangsa (PMB) yang juga dilahirkan oleh para kader muda Muhammadiyah yang merasa kecewa terhadap arah PAN yang dianggap sudah tidak sesuai dengan gagasan dan pemikiran mereka.

Kota Yogyakarta dipilih sebagai obyek penelitian karena peneliti melihat perkembangan PAN di Kota Yogyakarta memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri. Apalagi PAN berhasil menempatkan 2 kadernya yaitu Herry Zudianto, SE sebagai Walikota Yogyakarta dan Arif Noor Hartanto, SIP sebagai Ketua DPRD Kota. Lebih spesifiknya penelitian ini akan memetakan

faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan suara PAN pada pemilu 2009 di Kota Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan melihat latar belakang masalah diatas, penelitian ini perlu dipertegas rumusan masalahnya, yaitu: Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi turunnya perolehan suara PAN pada pemilu 2009 di Kota Yogyakarta?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji suatu kebenaran pengetahuan, disamping itu penelitian menurut Masri Singarimbun adalah “Tujuan pokok peneltiian adalah menjawab pertanyaan. Untuk mencapai tujuan pokok ini peneliti menyimpulkan data, membuat analisa dan Interpretasi”<sup>7</sup>

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi penyebab menurunnya perolehan suara PAN di Kota Yogyakarta.

Sedangkan manfaat penelitian adalah:

2. Bagi DPD PAN Kota Yogyakarta hasil penelitian ini sebagai bahan melakukan evaluasi terhadap hasil yang sudah dicapai di pemilu 2009.

---

<sup>7</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1989, hal 39

3. Bagi DPD PAN Kota Yogyakarta hasil penelitian ini sebagai bahan untuk menentukan strategi kampanye untuk mengikuti pemilu 2014 dan pemilu seterusnya.
4. Bagi Partai Amanat Nasional penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan juga dapat dijadikan sebagai tolok ukur sehingga dapat meningkatkan kinerja partai dimasa yang akan datang.
5. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bacaan dan ilmu pengetahuan khususnya di bidang politik.

## **D. Kerangka Dasar Teori**

### **1. Pemilihan Umum**

Pemilu secara sederhana merupakan suatu cara untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat menjalankan roda pemerintahan<sup>8</sup>. Pemilihan Umum pada hakekatnya adalah suatu kenyataan yang dilakukan oleh rakyat pemilih untuk memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam lembaga perwakilan rakyat yang disebut DPR.

Pemilu merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Pemerintahan yang dibentuk melalui pemilu itu adalah berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan

---

<sup>8</sup>Haryanto, *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hal 81

kehendak rakyat<sup>9</sup>. Pemilu adalah sarana demokrasi yang penting, ia merupakan perwujudan nyata keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan<sup>10</sup> Pemilu salah satu ciri yang melekat pada negara yang menganut paham demokrasi. Dengan demikian berarti pula bahwa pemilu merupakan sarana yang penting untuk melibatkan rakyat dalam kehidupan kenegaraan yaitu jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan jalannya roda pemerintahan<sup>11</sup>.

Oleh karena itu muncul anggapan yang menyatakan bahwa semakin banyak rakyat yang terlibat dalam pemilu dan semakin tinggi tingkat kebebasan memilih dari pengaruh dan tekanan atau paksaan dari pihak-pihak tertentu dalam penyelenggaraan pemilu, maka dapat dinyatakan menjadi semakin tinggi kadar demokrasi yang didapat negara penyelenggara pemilu tersebut. Oleh karena itu bila sebuah negara akan menyelenggarakan pemilihan umum maka negara tersebut membutuhkan indikator-indikator guna mengukur partisipasi masyarakat untuk mensukseskan pemilihan umum.

Ada berbagai indikator untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, yaitu:

1. Kesiediaan untuk mendaftar atau mendaftarkan diri sebagai pemilih,

---

<sup>9</sup>UU No. 3 Tahun 1999, Penjelasan tentang Pemilihan Umum, Tamita, Utama, Jakarta 1999 hal 61

<sup>10</sup>A Suduharto Djiwandono dalam Haryanto, *Partai Politi Suatu Tinjauan Umum*, Liberty, Yogyakarta, 1984 hal 81

<sup>11</sup>Haryanto..*Op.cit* hal 84

2. Kesiediaan untuk dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai anggota dewan,
3. Kesiediaan untuk mengikuti dan menghadiri kampanye,
4. Kesiediaan untuk mengikuti penghitungan suara,
5. Kesiediaan untuk mengikuti hasil penghitungan suara,
6. Keterlibatannya dalam partai politik baik langsung ataupun tidak langsung.

Di dalam negara-negara demokratis pada umumnya dianggap, bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum akan lebih baik. Disini menunjukkan bahwa tingginya tingkat partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah-masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan itu. Sebaliknya tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena diartikan warga negara tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan, serta dikhawatirkan apabila tidak ada pendapat dari masyarakat yang tidak dikemukakan maka pimpinan negara akan kurang tanggap kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan cenderung untuk melayani kepentingan beberapa kelompok saja.

Dahl mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah sistem politik dimana para anggotanya saling memandang antara yang satu dengan yang lainnya sebagai orang-orang yang sama dalam segi politik, secara bersama-sama berdaulat, memiliki kemampuan, sumber daya, dan lembaga-lembaga yang

mereka perlukan untuk memerintah diri mereka sendiri. Indikator demokrasi yang diajukan Dahl adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Adanya kontrol terhadap kebijakan pemerintah.
- b. Adanya pemilihan umum yang diadakan secara damai dalam jangka waktu tertentu, terbuka, dan bebas.
- c. Semua orang dewasa mempunyai hak untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum.
- d. Hampir semua orang dewasa mempunyai hak untuk mencalonkan diri sebagai kandidat dalam pemilihan umum.
- e. Setiap warga negara memiliki hak politik, seperti kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat, termasuk didalamnya mengkritik pemerintah.
- f. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan akses informasi alternatif yang tidak dimonopoli oleh pemerintah atau kelompok tunggal lain.
- g. Setiap warga negara berhak untuk membentuk dan bergabung dengan lembaga-lembaga otonom, termasuk partai politik dan kelompok kepentingan yang berusaha untuk mempengaruhi pemerintah dengan mengikuti pemilihan umum dan dengan perangkat-perangkat lainnya.

---

<sup>12</sup> Robert Dahl, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1992, hal. 1.

Untuk menentukan sistem pemilu yang tepat bagi sebuah negara atau masyarakat, menurut Afan Gaffar<sup>13</sup>, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1. *Electoral formula* (sistem pemilu). Electoral formula ini akan menentukan alokasi kursi yang diberikan pada masing-masing partai yang bersaing. Dalam Ilmu Politik secara umum dikenal dua jenis sistem pemilihan, yaitu:

a. Sistem Distrik/Sistem Pluralistik (*single-member constituency*)

Sistem ini merupakan sistem yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis yang lazim disebut distrik. Setiap distrik, mempunyai satu wakil dalam dewan perwakilan rakyat.

b. Sistem Representasi Proporsional (*multi-member constituency*)

Gagasan pokok dalam sistem ini adalah bahwa jumlah kursi yang diperoleh suatu partai sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya.

2. *Distric magnitude* (besaran kursi dalam distrik). *Distric magnitude* menentukan jumlah wakil rakyat yang dipilih disetiap distrik. Besaran distrik bisa berbeda-beda tergantung pada kepadatan penduduknya. Semakin besar *magnitude* sebuah distrik, makin besar partai-partai kecil terlindungi.

---

Afan Gaffar, "Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hal 255-256

3. *Electoral threshold*, yaitu jumlah dukungan minimal yang harus diperoleh partai untuk mendapatkan kursi dilembaga perwakilan.

Pelaksanaan pemilu 2009 didasarkan pada Undang-undang No.10 tahun 2008 tentang pemilihan umum, pasal 1 ayat (1) berbunyi :

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. **(pasal 1)**

Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. **(Pasal 2)**

Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. **(Pasal 3)**

Dari pasal-pasal tersebut bisa dilihat upaya konstitusional untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis.

Berikut ini adalah ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pemilu legislatif 2009, dan ada sedikit perbedaan dibanding pemilu 2004 yang lalu. Kalau kita lihat garis besar RUU tentang Pemilu yang sudah disepakati DPR untuk ditetapkan menjadi UU tentang Pemilu (Legislatif) <sup>14</sup> yakni UU No 10 tahun 2008 yaitu ;

---

<sup>14</sup><http://www.bangakbar.com/article/10/tahun/2008/bulan/04/tanggal/09/id/164/index.html>

1. Penamaan sistem pemilu yang digunakan UU ini adalah sistem proporsional terbuka (Pasal 5 ayat (1). Namun demikian, terdapat ketentuan bahwa “setiap calon terpilih ditentukan dengan perolehan suara sekurang-kurangnya 30% dari BPP bagi setiap calon anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kab/kota. Apabila calon yang memperoleh sekurang-kurangnya 30 % dari BPP di satu partai politik melebihi jumlah kursi yang diperoleh partai politik tersebut di satu daerah pemilihan maka di kembalikan pada nomor urut (Pasal 214)”. Karena itu sistem pemilunya lebih dikenal sebagai sistem proporsional terbuka terbatas.
2. Selain *Electoral Threshold* (ET), diperkenalkan juga konsep *Parliamentary Threshold* (PT). Angka *Electoral Threshold* ditetapkan sebesar 3% yang berlaku untuk Pemilu 2009 dengan aturan peralihan dikecualikan bagi partai yang telah memiliki kursi di DPR (Pasal 315). Angka *Parliamentary Threshold* sebesar 2,5% untuk tahun 2009 (Pasal 202 ayat (1))
3. Jumlah bakal calon di dalam 1 daerah pemilihan sejumlah 120% (seratus dua puluh per seratus) dari jumlah kursi yang ada dalam setiap dapil (Pasal 54). Alokasi kursi untuk setiap daerah pemilihan 3 (tiga) sampai dengan 10 (sepuluh) kursi (Pasal 22).

4. UU ini menyatakan pemilu dilaksanakan berdasarkan asas efisien dan efektif selain asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang dasar 1945 (Pasal 2)
5. Teknis pemilu yang dipermudah: (a) kemudahan yang diberikan adalah WNI yang memiliki hak memilih dan terdaftar dalam daftar pemilih tidak memerlukan kartu pemilih dalam menggunakan hak memilihnya tetapi cukup dengan menunjukkan KTP atau identitas lainnya serta paspor bagi WNI yang berada di luar negeri (Pasal 19 dan 20); (b) Cara memberikan suara dilakukan dengan cara memberi tanda 1 (satu) kali pada surat suara dengan dasar memudahkan pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisien dalam pelaksanaan pemilu (Pasal 153); (c) Jumlah pemilih tetap TPS paling banyak 500 pemilih. Hal ini akan lebih meningkatkan efisiensi biaya pemilu (Pasal 150).
6. Keterwakilan perempuan dengan ketentuan dalam daftar calon yang diajukan parpol memuat 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan, dalam setiap 3 (tiga) nama calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) calon perempuan (Pasal 53 dan 55)

7. Jumlah Anggota DPR 560 kursi (Pasal 21). Jumlah Anggota untuk DPRD provinsi tetap yakni paling sedikit 35 dan paling banyak 100 (Pasal 23 ayat (1)). Sedangkan klasifikasi bagi kursi DPRD kabupaten/kota yang berpenduduk lebih satu juta menjadi 50 kursi (Pasal 26 ayat (1)). Daerah pemilihan DPRD tidak berubah, yakni daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan/gabungan kecamatan; dan DPRD Propinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota (pasal 24 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1)).
8. Adanya kesempatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan daftar pemilih. Daftar pemilih yang telah disusun, diumumkan kepada masyarakat sebanyak 2 (dua) kali untuk memperoleh masukan dan tanggapan sebelum disusun DPT (Pasal 43). Setelah DPT ditetapkan, masih dimungkinkan ada tambahan tetapi tidak merubah jumlah DPT secara nasional, bagi yang melakukan perpindahan pada saat pemungutan suara, sakit, tugas, atau sebab lain yang menyebabkan pemilih tersebut tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS bersangkutan (Pasal 40) KPU kab/kota harus memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada parpol peserta pemilu di tingkat kab/kota (Pasal 38 ayat (5)).

9. Penyelesaian seketika terhadap kesalahan dan kekeliruan pelaksanaan pemilu. Penyelesaian terhadap pelanggaran ketentuan pidana pemilu dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dengan hakim khusus. Putusan pengadilan terhadap kasus pelanggaran pidana pemilu yang dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional (Pasal 252, 254, 257 ayat (1)).
10. Penghitungan sisa suara dilakukan dengan penghitungan perolehan kursi tahap kedua dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Parpol peserta pemilu yang memperoleh sekurang-kurangnya 50% dari BPP DPR (Pasal 205 ayat (4)).
11. Penghitungan sisa suara: (a) Apabila masih terdapat sisa kursi, maka dilakukan penghitungan tahap ketiga, dengan cara memberikan kursi kepada parpol yang mencapai BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan. (Pasal 205 ayat (7)); (b) Apabila masih terdapat sisa kursi, penetapan perolehan kursi parpol peserta pemilu dilakukan dengan membagikan sisa kursi kepada parpol peserta pemilu di provinsi satu demi satu

berturut turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak (Pasal 206)

12. Aturan *survey* dan penghitungan cepat: (a) hasil *survey* yang berkaitan dengan preferensi terhadap peserta pemilu tidak boleh diumumkan hasilnya dalam masa tenang (Pasal 245 ayat (2)); (b) penghitungan cepat dilakukan dengan memberi tahukan metode yang digunakan serta perlu penegasan hasilnya bukan hasil resmi dari penyelenggaraan pemilu dan pengumumannya baru dapat diumumkan pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara (Pasal 245 ayat (3)).

Adapun cara perhitungan perolehan kursi pemilu DPRD (Provinsi dan Kabupaten/kota) Pemilu 2009<sup>15</sup> yakni : caleg terpilih adalah caleg yang berasal dari parpol-parpol yang lolos 2,5 % PT (*Parliament Threshold*). Ketentuan 2,5 % PT ini tidak berlaku untuk Pemilu DPRD (Provinsi & Kab/Kota), dengan demikian kompetisi memperebutkan kursi DPRD akan menjadi lebih terbuka bagi caleg yang berasal dari partai kecil maupun partai baru. Ini berarti Pemilu DPRD menjadi semakin kompetitif diantara para caleg yang berasal dari ke-38 Parpol (kecuali di NAD, ditambah 6 parpol lokal).

- 1) Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS)

---

<sup>15</sup> *Ibid*

- 2) Partai Daulat Aceh (PDA)
- 3) Partai Suara Independet Rakyat Aceh (SIRA)
- 4) Partai Rakyat Aceh (PRA)
- 5) Partai Aceh
- 6) Partai Bersatu Aceh (PBA)

Perolehan suara pemilu legislatif terdiri atas perolehan suara parpol dan perolehan suara caleg. Artinya di suatu daerah pemilihan (dapil) akan terdapat perolehan suara parpol yang berasal dari perolehan suara masing-masing caleg parpol tersebut. **Bilangan pembagi pemilihan** (BPP), secara umum dapat diartikan sebagai **harga satu buah kursi**. BPP suatu dapil diperoleh dari pembagian jumlah suara sah dengan alokasi jumlah kursi di suatu dapil.

Untuk menentukan perolehan kursi DPRD (Provinsi dan Kabupaten/Kota), maka terlebih dahulu diketahui jumlah suara per parpol, selanjutnya kursi dibagikan kepada parpol yang terbagi atas BPP; yaitu parpol yang mencapai atau melebihi BPP (kita sebut saja **Parpol BPP**). Bila terdapat **sisanya kursi**, maka sisa kursi akan dihabiskan dengan cara membagikan sisa kursi kepada parpol-parpol (baik parpol BPP maupun **parpol non BPP**) dengan mengurutkan suara atau sisa suara parpol - parpol tersebut berdasarkan sistem ranking.

Dengan demikian, tahapan **perhitungan perolehan kursi parpol** pada Pemilu DPRD (Provinsi dan Kabupaten/Kota) terdiri atas 2 (dua) tahap, yakni

**sistem BPP** (Tahap I) dan **sistem rangking** (Tahap II, bila terdapat sisa kursi).

*Contoh sederhana* :\_Misalkan di dapil A, Berdasarkan Penetapan KPUD alokasi jumlah kursi sebanyak 10 kursi dan jumlah Daftar Pemilih (DP4) 1.200.000 orang. Pertanyaan : Berapa BPP-nya? dan bagaimana pembagian kursinya ?

Bila pada hari pemilihan yang datang ke TPS hanyalah 1.050.000 orang, dan jumlah suara yang dinyatakan sah sebesar 1.000.000, jumlah suara tidak sah 50.000 (karena salah dalam hal pencantangan, dll). maka BPP-nya adalah 1.000.000 (suara sah) dibagi 10 (kursi), sehingga diperoleh besaran **BPP sebesar 100.000** suara.

Selanjutnya kursi terlebih dahulu dialokasikan kepada parpol yang mencapai perolehan suara 100.000 keatas (**Parpol BPP**). Katakanlah yang tergolong Parpol BPP hanya 6 dari 38 parpol, serta masing-masing memperoleh 1 Kursi. Sehingga terdapat sisa 4 Kursi, selanjutnya sisa kursi akan dibagi habis kepada parpol - parpol (**Baik parpol BPP maupun Parpol Non BPP**) berdasarkan urutan perolehan suara terbesar (**sistem rangking**).

Berdasarkan ketentuan pasal 214 UU 10/2008 caleg terpilih adalah caleg yang memperoleh sekurang-kurangnya 30 % BPP. Bila terdapat berbagai variasi antara jumlah caleg yang memperoleh sekurang-kurangnya 30 % BPP dengan jumlah kursi disuatu parpol, maka caleg terpilih akan ditentukan berdasarkan nomor urut.

Harris G. Warren dan kawan-kawan mengemukakan batasan mengenai pemilihan umum adalah merupakan kesempatan bagi para warga Negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah mereka inginkan untuk dikerjakan pemerintah. Dan dalam membuat keputusan itu para warga negara menentukan apakah yang sebenarnya mereka inginkan untuk dimiliki.<sup>16</sup>

Pemilu tidak lain adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat dan karenanya bagi suatu negara demokrasi, harus dilaksanakan dalam waktu tertentu.<sup>17</sup>

Pemilihan Umum merupakan pranata terpenting dalam tiap negara demokrasi. Pranata ini berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip pokok demokrasi, kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, dan pergantian pemerintah secara teratur.<sup>18</sup>

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum adalah suatu proses memilih yang dilaksanakan oleh warga negara untuk menentukan wakil-wakil mereka yang menduduki jabatan di pemerintah sekaligus merupakan kesempatan bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi atau keinginan-keinginan kepada pemerintah. Atau suatu cara yang ditempuh oleh

---

<sup>16</sup>Haryanto..*Op.cit* hal 81

<sup>17</sup>Moh Kunardi dan Harmaily Ibrahim, dalam *Mashudi, Pengertian-pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum Pemilu di Indonesia Menurut UUD 1945*, Msndar Maju Bandung, 1993 hal 2

<sup>18</sup>Tim Peneliti Sistem Pemilihan Umum, *Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Sebuah Laporan Penelitian, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1998 hal 2

satu sistem politik untuk memilih wakil-wakilnya (*legislatif*) maupun pemimpin pemerintahan (*eksekutif*).

## **2. Partai Politik**

Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai yang sama. Kelompok ini berusaha memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka<sup>19</sup>. Pada awalnya partai politik lahir di Eropa Barat tetapi kini mulai tumbuh mendunia, partai politik lahir karena semakin meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan kekuatan penuh yang diperhitungkan dan diikutsertakan dalam proses politik<sup>20</sup> dan adapun teori partai politik lainnya:

a. Menurut Carl J. Friedrich sebagai berikut:

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil. (*A political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the*

---

<sup>19</sup>Miriam budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia, hal 160-166

<sup>20</sup>*Ibid* hal 159

*control of a government, with the further objective of giving to member of the party, trough such control ideal and material benefits and advantages)*<sup>21</sup>.

b. Mark N. Hagopian sebagai berikut:

Partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan<sup>22</sup>

c. Raymond Garfield atau R.H. Soltau sebagai berikut:

Partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka. (*A group of citizens more or les organized, who act as a political unit and who, by the use of their voting power, aim to control the government and carry out their general policies*)<sup>23</sup>

d. Sigmund Neumann sebagai berikut:

Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan

---

<sup>21</sup>*Ibid*, hal 161

<sup>22</sup>Mark N. Hagopian, Dalam Ichlasul Amal, *Teori Mutakhir Patai Politik*, PT Tiara Wacana 1988

<sup>23</sup>Firman Hamidi, *Strategi DPD PAN Sleman Menghadapi Pemilu 2004*, (skripsi). IP UMY, 2003.

lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. (*A political party is the articulate organization of society's active political agents, those who are concerned with the control of governmental power and who compete for popular support with another group or groups holding divergent views*)<sup>24</sup>

Berdasarkan beberapa definisi mengenai partai politik di atas, maka secara umum partai politik dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang terorganisir serta berusaha untuk mengendalikan pemerintahan agar dapat melaksanakan program-programnya dan menempatkan atau mendudukan anggota-anggotanya dalam jabatan pemerintahan<sup>25</sup>. Dalam UU no.31 tahun 2002 tentang Partai Politik pasal 1 disebutkan bahwa:

Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.

Dengan melihat gambaran mengenai partai politik adalah sebagai sarana aspirasi rakyat kepada pemerintah akan melalui partai politik akan tetapi harus dipahami bahwa partai politik merupakan organisasi dalam suatu negara yang bertujuan untuk mempengaruhi kekuasaan publik dengan cara menempatkan wakilnya untuk duduk di dalam pemerintahan maupun parlemen.

---

<sup>24</sup>Miriam budiharjo, *Op.cit*, hal 162

<sup>25</sup>Haryanto, *Sistem Politik: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal. 89-96

Seperti halnya sebuah struktur dalam politik, fungsi tersebut adalah representasi, konvensi, agregasi, integrasi, recruitment (pengangkatan tenaga-tenaga baru), pertimbangan-pertimbangan kebijakan serta kontrol terhadap pemerintahan<sup>26</sup>. Tujuan partai politik ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kekuasaan (biasanya dengan cara-cara konstitusionil) untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka<sup>27</sup>

A. Dalam sebuah negara yang menganut demokrasi partai politik mempunyai fungsi:<sup>28</sup>

#### 1. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik

Salah satu tugas partai politik adalah menyalurkan segala aspirasi yang berkembang di masyarakat supaya tidak terjadi kesimpangsiuran. Segala masukan dan aspirasi ini kemudian ditampung untuk kemudian diteruskan menjadi sebuah saran kebijakan melalui wakil-wakil partai tersebut yang duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif. Partai juga berusaha untuk melakukan sosialisasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap masyarakat luas terutama konstituennya (dalam hal ini partai sering disebut sebagai *broker*). Dengan fungsi tersebut maka partai politik melakukan komunikasi politik melalui dua arah yaitu dari atas melalui penyebarluasan kebijakan-kebijakan pemerintah, juga dari bawah dengan cara menyampaikan

---

<sup>26</sup>Roy C Macridisk, *Pengantar Sejarah Fungsi Dan Tipologi Partai-Partai* dan Ichlasul Amal hal 27

<sup>27</sup>Mirriam Budiarto, *Op.Cit.*, hal 160-161

<sup>28</sup>*Ibid.*, hal. 163-164.

saran adan tuntutan dari masyarakat melalui wakil-wakilnya yang ada di lembaga tinggi negara.

## 2. Partai Politik sebagai sarana sosialisasi

Kedudukan partai sebagai organisasi yang melaksanakan sosialisasi politik berarti partai dalam setiap kegiatannya baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan suatu perspektif, sikap dan orientasi kepada masyarakat dalam melihat fenomena politik. Proses ini berlangsung secara terus menerus dari masa kanak-kanak sampai orang itu dewasa. Fungsi ini dilakukan melalui kampanye-kampanye dan diskusi-diskusi politik suatu partai dalam usahanya memenangkan pemilu. Melalui ini partai menanamkan *image* yang positif kepada calon pendukungnya, sekaligus memberikan pandangan dan sikap kepada mereka dalam menilai isu-isu politik.

## 3. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik

Ini dimaksudkan bahwa partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political recruitment*). Caranya yaitu dengan persuasi, kontak pribadi, *open recruitment*, dan lain sebagainya. Dengan demikian partai telah turut serta memperluas partisipasi politik dan mengikis diskriminasi politik. Melalui sarana rekrutmen politik juga partai bertanggungjawab dalam menjamin sirkulasi kepemimpinan politik di suatu negara, karena diharapkan dalam jangka panjang partai melakukan *follow up*

dengan melakukan kaderisasi anggota-anggotanya supaya meneruskan tongkat estafet kepemimpinan politik dimasa mendatang.

#### 4. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik

Dalam suasana demokrasi dimana perbedaan pendapat di masyarakat rentan memunculkan konflik maka partai politik melakukan fungsinya dalam mengatur konflik tersebut supaya tidak menimbulkan ekses negatif. Partai dituntut untuk menyelesaikan konflik yang sedang terjadi. Namun dalam perkembangannya justru partai politiklah yang kerap membuat konflik itu sendiri demi kepentingan pragmatis.

#### B. Klasifikasi partai Politik

Klasifikasi partai politik dapat dilakukan dengan berbagai cara<sup>29</sup>. Bila dilihat dari segi komposisi dan fungsi keanggotaannya, secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu:

##### a. Partai Massa

Partai massa mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota, oleh karena itu ia biasanya terdiri dari pendukung-pendukung dari berbagai aliran politik dalam masyarakat yang sepakat untuk bernaung dibawahnya dalam memperjuangkan suatu program yang biasanya bias dan agak kabur.

---

<sup>29</sup>Riswandha Immawan , *Membedah Orde Baru*, Yogyakarta, CV Pustaka Pelajar, 1997, hal 166-167

#### b. Partai Kader

Partai kader mementingkan keketatan organisasi dan disiplin kerja dari anggota-anggotanya. Pimpinan partai biasanya menjaga kemurnian doktrin politik yang dianut dengan jalan mengadakan saringan terhadap calon anggotanya dan memecat anggotanya yang menyeleweng dari garis partai yang telah ditetapkan.

Berdasarkan sifat dan orientasinya dalam klasifikasi partai politik dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu:

##### a. Partai Lindungan

Partai lindungan umumnya memiliki organisasi yang kendur, disiplin yang lemah dan biasanya tidak mementingkan pemungutan iuran secara teratur. Maksud utamanya adalah memenangkan pemilu untuk anggota-anggota yang dicalonkan.

##### b. Partai Ideologi

Partai ini mempunyai pandangan hidup yang digariskan dalam kebijaksanaanpimpinan dan berpedoman pada disiplin partai yang kuat dan mengikat. Terhadap calon anggotanya diadakan seleksi, sedangkan untuk menjadi anggota pimpinan diisyaratkan lulus dari berbagai macam tes.

Partai politik dapat dibedakan menurut orientasi:

1. Pragmatis: :Partai yang mempunyai program dan kegiatan yang tidak terikat pada suatu doktrin dan ideologi tertentu.

2. Partai: :Partai yang tidak mempunyai program dan kegiatan yang terkait pada suatu doktrin dan ideologi tertentu.

3. Kepentingan: :Partai yang mempunyai program dan kepentingan yang terikat oleh suatu kepentingan dari pemimpinnya.

Partai adalah tempat sekelompok orang yang memiliki ideologi dan tujuan yang sama, berkumpul bersama untuk mewujudkan keinginannya yang sama pula. Sehingga partai bisa disebut sebagai sebuah organisasi.

Maurice Duverger mengatakan bahwa ada hal yang membedakan antara partai dengan organisasi<sup>30</sup>yaitu:

1) Organisasi Horizontal

Dibagi menjadi dua yaitu:

a. *Direct Parties* (Partai Langsung)

Partai langsung ini berabgotakan perorangan atau individu-individu.

b. *Indirect Parties* (Tidak Langsung)

Dalam partai ini anggotanya adalah kolektif yaitu sebagai suatu keseluruhan, jadi partai tidak langsung tidak mempunyai anggota orang atau individu akan tetapi menghimpun satuan organisasi yang sudah ada.

---

<sup>30</sup>Maurice Duverger, *Political Parties, Their Organization and Activity In The Modern Stats, Pengantar Ilmu Politik, Jakarta, Ghalia Indonesia 1984, hal 116-119*

## 2) Organisasi Vertikal

Satuan dasar dari susunan ini adalah elemen dasar, yang terdiri dari empat macam elemen dasar, yaitu:

### *a. Caucus*

Merupakan satuan yang tertutup dan organisasinya tidak permanen, orang yang masuk dalam *caucus* diharapkan dapat menyenangkan pemilihan karena masuk kedalamnya melalui seleksi oleh anggota yang telah ada., maka untuk itu *caucus* terletak pada loyalitas anggotanya.

*Caucus* dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

- *Caucus* langsung yang anggotanya kaum elit, *middle, class*
- *Caucus* tidak langsung yang anggotanya ditunjuk oleh kolektif

anggota partai

### *b. Branch*

Adalah kebalikan dari *caucus*, satuannya terbuka dan berusaha selalu untuk menambah anggotanya dan mempunyai organisasi serta administrasi yang permanen.

### *c. Cell*

*Cell* merupakan satuan dasar dari suatu partai, perbedaan antar cell dan branch yang terpenting yaitu terletak pada kelompok dan jumlah anggotanya.

#### d. *Militan*

Suatu laskar yang diorganisasikan secara hirarkis seperti di dalam ketentaraan, terdapat pembagian kelompok secara regu, batalyon, dan sebagainya. Beberapa cara untuk membedakan partai politik dengan organisasi lainnya adalah, satu, partai politik akan ikut pemilu, dua, partai politik akan menempatkan wakil-wakilnya dalam jabatan publik melalui proses pemilu<sup>31</sup>.

Menurut Maurice Duverger dalam bukunya *Political Parties* demikian juga dengan G.A Jacobsen dan M.H Lipman dalam bukunya *Political Science* mengklasifikasikan sistem kepartaian kedalam tiga macam sistem, yaitu:<sup>32</sup>

##### a). Sistem partai tunggal (one party system)

partai politik merupakan alat pemerintahan dari perhimpunan sukarela pada pemilih, sistem partai tunggal meliputi baik negara yang benar-benar hanya mempunyai satu partai di samping itu juga negara dimana ada satu partai yang dominan. Dalam negara dengan partai tunggal, keadaan kepartaian negara dalam tersebut dapat dinamakan tidak bersaing atau non kompetitif, disebabkan karena partai-partai yang ada

---

<sup>31</sup>Bambang Eka CW, *Catatan Sistem Kepartaian Dan Pemilu, 2000*

<sup>32</sup> Maurice Duverger, G.A. Jacobson dan M.H. Lipman, di dalam Soelistyati Ismail Gani, *Pengantar Ilmu Politik*, (Galia Indonesia, Yogyakarta, 1984).,hal. 114-115

dalam negara harus menerima pimpinan dari partai yang dominan serta tidak dibenarkan untuk bersaing secara bebas dan terbuka.

b). Sistem dua partai (two party system)

di negara tersebut ada dua partai atau lebih dari dua partai, akan tetapi yang memegang peranan dominan hanyalah dua partai, partai di bagi menjadi dua yaitu partai besar yang berkuasa, karena memang dalam pemilihan umum dinamakan mayoritas party, partai ini memegang tanggung jawab untuk urusan-urusan umum. Sedangkan lainnya dinamakan minoritas party atau partai oposisi karena kalah dalam pemilihan umum. Partai oposisi mempunyai tugas untuk memeriksa dengan teliti dan mengkritik politik pemerintah.

c). sistem multi partai (multy party system)

dalam negara tersebut ada beberapa partai yang hampir sama kekuatannya. Masing-masing partai mempertahankan suatu politik tertentu tentang satu atau sejumlah persoalan-persoalan yang penting. Suatu negara dengan sistem multi partai masing-masing pemilih partai mendukung partai yang hampir sesuai dan mewakili pendukungnya sendiri.

Pasca reformasi 1998 sistem kepartaian Indonesia bisa dikategorikan dalam sistem multi partai. Partai-partai politik kembali bermunculan, setelah sebelumnya kehidupan sistem kepartaian dibelenggu oleh orde baru dan didominasi oleh Golongan Karya dan bisa diklasifikasikan dalam sistem

partai tunggal. Pada Pemilu 1999 tercatat ada empat puluh delapan partai politik yang mengikuti pemilu dan pada Pemilu 2004 terdapat dua puluh empat partai politik peserta pemilu. Sistem pemilu yang digunakan adalah sistem perwakilan berimbang.

Dengan munculnya banyak partai tanpa adanya satu atau dua partai yang mendominasi secara mayoritas, maka persaingan untuk mendapatkan kursi dan mendudukkan kadernya dalam jabatan pemerintahan menjadi semakin ketat. Oleh karena itu, penting bagi partai politik untuk melakukan pengelolaan kegiatan kampanye secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perolehan suara suatu partai politik dalam pemilu, salah satu diantaranya yaitu, perilaku pemilih. Akan tetapi ada sekelompok orang yang terkadang memilih karena partai atau kandidat tertentu dianggap representatif dari kelas sosialnya dan ada juga suatu kelompok yang memilih sebagai ekspresi dari sikap loyal pada partai atau figure tokoh tertentu.

### C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perolehan Suara Partai Politik dalam Pemilu

Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan politik sangat diperlukan dalam menyusun strategi *marketing*. Informasi mengenai faktor-faktor tersebut dapat berguna untuk menyusun strategi komunikasi, manajemen kandidat, dan penyusunan isu dan kebijakan yang akan ditawarkan kepada

para pemilih.

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi pilihan politik seseorang, yang terpenting dan sangat berpengaruh pada perolehan suara parpol dalam pemilu adalah perilaku politik masyarakat sebagai peserta pemilu. Efektifitas dan efisiensi penyampaian pesan politik apa dan dengan cara bagaimana pesan disampaikan atau ditentukan oleh pemahaman perilaku politik. Siapa, kapan, dan bagaimana seorang kandidat tampil agar dapat menarik massa, juga ditentukan perilaku pemilih. Perilaku pemilih menjadi informasi penting yang sangat berguna dalam merencanakan kampanye dan alokasi sumberdaya yang dimiliki seorang kandidat atau sebuah partai.

Newman & Sheth (1985) mengembangkan model perilaku pemilih berdasarkan beberapa domain yang terkait dengan *marketing*. Dalam mengembangkan model tersebut, mereka menggunakan sejumlah kepercayaan kognitif yang berasal dari berbagai sumber seperti pemilih, komunikasi dari mulut ke mulut, dan media massa. Model ini dikembangkan untuk menerangkan dan memprediksikan perilaku pemilih.

Menurut model ini, perilaku pemilih ditentukan oleh tujuh domain kognitif yang berbeda dan terpisah, sebagai berikut:

- a. Isu dan kebijakan politik (*issue and policies*); merepresentasikan kebijakan atau program yang diperjuangkan dan dijanjikan oleh partai atau kandidat politik jika kelak menang pemilu. Inilah platform dasar yang ditawarkan oleh kontestan Pemilu kepada para pemilih. Yang

termasuk dalam komponen ini adalah kebijakan ekonomi, kebijakan luar negeri, kebijakan dalam negeri, kebijakan sosial, kebijakan politik dan keamanan, kebijakan hukum, dan karakteristik kepemimpinan.

b. Citra sosial (*social imagery*); menunjukkan stereotip kandidat atau partai untuk menarik pemilih dengan menciptakan asosiasi antara kandidat atau partai dengan segmen-segmen tertentu dalam masyarakat. *Social imagery* adalah citra kandidat dalam pikiran pemilih mengenai "berada" di dalam kelompok sosial mana atau tergolong sebagai apa sebuah partai atau kandidat politik. *Social imagery* dapat terjadi berdasarkan banyak faktor, antara lain:

1) Demografi:

- Usia (contoh: *partai orang muda*)
- Gender (contoh: *calon pemimpin bangsa dari kaum hawa*)
- Agama (contoh: *partai orang Islam, partai orang Katolik*)

2) Sosio ekonomi:

- Pekerjaan (contoh: *partai kaum buruh*)
- Pendapatan (contoh: *partai wong cilik*)

3) Kultural dan etnik:

- Kultural (contoh: *kandidat presiden yang seniman*)
- Etnik (contoh: *partai orang jawa*)

4) Politis-ideologi (contoh: *partai nasionalis, partai agamis, partai konservatif, partai moderat*).

- c. Perasaan emosional (*emotional feeling*); dimensi emosional yang terpancar dari sebuah kontestan atau kandidat yang ditunjukkan oleh *policy* politik yang ditawarkan.
- d. Citra kandidat (*candidate personality*); mengacu pada sifat-sifat pribadi yang penting yang dianggap sebagai karakter kandidat. Pada Pemilu Amerika tahun 1980, misalnya, Reagan memiliki citra sebagai "pemimpin yang kuat", sementara John Glen pada tahun 1984 mencoba mengembangkan citra sebagai "seorang pahlawan". Beberapa sifat yang juga merupakan *candidate personality* adalah artikulatif, welas-asih, stabil, energik, jujur, tegar, dan sebagainya.
- e. Peristiwa mutakhir (*current events*); mengacu pada himpunan peristiwa, isu, dan kebijakan yang berkembang menjelang dan selama kampanye. Secara umum, current events dapat dibagi menjadi masalah domestik dan luar negeri. Yang termasuk dalam masalah domestik misalnya adalah tingkat inflasi, prediksi ekonomi, gerakan separatis, ancaman keamanan, merajalelanya korupsi, dan sebagainya. Sedangkan masalah luar negeri misalnya perang antara negara-negara tetangga, invasi sebuah negara ke negara lainnya, dan contoh lainnya yang mempunyai pengaruh baik langsung maupun tidak langsung kepada para pemilih.
- f. Peristiwa pribadi (*personal events*); mengacu pada kehidupan pribadi dan peristiwa yang pernah dialami secara pribadi oleh seorang

kandidat misalnya skandal seksual, skandal bisnis, menjadi korban rezim tertentu, menjadi tokoh pada perjuangan tertentu, ikut berperang untuk mempertahankan tanah, dan sebagainya.

- g. Faktor-faktor epistemik (*epistemic issues*); isu-isu pemilihan yang spesifik yang dapat memicu keingintahuan para pemilih mengenai hal-hal baru. Carter pada pemilihan Presiden Amerika tahun 1976 berhasil menunjukkan dirinya sebagai "wajah segar" pada dunia politik. Pada Pemilu Amerika tahun 1992, Ross Perot sempat muncul sebagai pesaing George Bush dan Bill Clinton. Bagi sebagian pemilih Ross Perot merepresentasikan seorang kandidat di luar *mainstream* dan terlihat sebagai seorang yang akan melakukan sesuatu yang berbeda dan unik dari tradisi politik. *Epistemic issues* ini sangat mungkin muncul di tengah-tengah ketidakpercayaan publik kepada institusi-institusi politik yang menjadi bagian dari sistem yang berjalan.

Dapat ditarik kesimpulan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih yang mempengaruhi perolehan suara parpol dalam pemilu, yaitu:<sup>33</sup>

1. *Social imagery* atau citra sosial (pengelompokan sosial)
2. Identifikasi partai
3. Kandidat:
  - a. *Emotional feeling*

---

<sup>33</sup> Adman Nursal, 2004. *Political Marketing*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hal. 70.



masing-masing. Seiring dengan hal tersebut, terjadi pula perubahan perilaku komunikasi massa dan komunikasi interpersonal yang jauh lebih bebas dibandingkan sebelumnya.

Ada tiga masalah dalam menciptakan peta umum perilaku pemilih Indonesia pasca Orde Baru yang nantinya akan berguna untuk menyusun strategi *marketing* dalam memenangkan pemilu, baik ditingkat legislatif maupun eksekutif. Ketiga masalah tersebut, diantaranya;<sup>34</sup>

1. Iklim sosial politik dewasa ini sangat berbeda dengan sebelumnya. Dengan demikian, kita tidak bisa begitu saja berasumsi bahwa pola perilaku saat ini identik dengan masa silam.
2. Indonesia memiliki wilayah geografis yang luas dan majemuknya faktor sosio kultural, sosio ekonomi, tingkat pendidikan, dan tingkat modernisasi. Dengan kondisi seperti itu, cukup sulit membuat model perilaku umum, terlebih karena terbatasnya jumlah penelitian yang dilakukan..
3. Berbagai studi yang ada baru menghasilkan kesimpulan yang terlalu "kasar" sehingga perlu dirinci lebih detail agar dapat diterapkan untuk menyusun strategi pemasaran.

---

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm. 78.

Sedangkan perilaku pemilih Indonesia pada pemilu sebelum reformasi atau bisa dikatakan pada masa silam, lebih berorientasi pada;

1. Orientasi Agama
2. Faktor Kelas Sosial dan Kelompok Sosial Lainnya; Menurut Affan Gafar, ada empat faktor penyebab ketidak munculan faktor kelas dipedesaan jawa, yaitu;
  - a. Sifat sistem ekonomi (agraris subsisten) tidak memungkinkan kesadaran massa berdasarkan kelas.
  - b. Setelah penghapusan PKI dan pengebiran partai politik, penduduk desa terdepolitisasi.
  - c. Adanya trauma kup G-30 S. Ribuan anggota partai komunis dibunuh, termasuk anggota Barisan Tani Indonesia di pedesaan Jawa.
  - d. Pemerintahan orba yang tak henti-hentinya menjelaskan bahwa individu maupun organisasi tidak diizinkan menonjolkan antagonisme dari perbedaan agama, ras, dan kelas.
3. Faktor Kepemimpinan dan Ketokohan
4. Faktor Identifikasi
5. Orientasi Isu
6. Orientasi Kandidat

Dengan adanya perubahan sistem pemilu 2009 dibandingkan dengan pemilu 2004 dan sebelumnya. Pada pemilu 2009 selain para pemilih

memilih gambar partai, pemilih juga diharuskan untuk dapat memilih langsung gambar dan nama caleg. Karena pemilu 2009 kali ini menggunakan sistem suara terbanyak dalam penentuan anggota legislatif. Berbeda dengan pemilu sebelumnya yang menggunakan sistem nomor urut calon legislatif.

#### 7. Kaitan dengan Peristiwa.

### **E. Definisi Konseptual**

Definisi konsepsional adalah usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian mengenai konsep yang satu dengan konsep yang lain agar tidak terjadi kesalahpahaman. Adapun definisi konsepsional yang dipergunakan adalah:

#### 1. Pemilihan Umum

Pemilihan wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam jabatan politik yang dilaksanakan secara teratur, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan sekaligus merupakan kesempatan bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi atau keinginan-keinginannya kepada pemerintah. suatu cara yang ditempuh oleh suatu sistem politik untuk memilih wakil-wakilnya (legislatif) maupun pemimpin pemerintahan (eksekutif).

#### 2. Partai Politik

Sebuah organisasi yang terdiri dari beberapa aktivis yang secara stabil mempunyai orientasi dan cita-cita yang kurang lebih sama dan bertujuan

untuk merebut, mempertahankan dan menjalankan pemerintahan sesuai dengan ideologi partainya melalui cara-cara konstitusional.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perolehan Suara Partai Politik dalam Pemilu

Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan politik sangat diperlukan dalam menyusun strategi *marketing*. Informasi mengenai faktor-faktor tersebut dapat berguna untuk menyusun strategi komunikasi, manajemen kandidat, dan penyusunan isu dan kebijakan yang akan ditawarkan kepada para pemilih.

## **F. Definisi Operasional**

Yang dimaksud definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel. Dengan kata lain definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur variabel<sup>35</sup>. Agar suatu penelitian dapat diukur variabel maka perlu dioperasionalkan dalam penelitian dengan kata lain variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik variabel yang sudah dicermati<sup>36</sup>.

Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Faktor Internal**

---

<sup>35</sup>Rusli Karim, dalam Faizal, *Peran dan Fungsi Partai Keadilan sebagai sebuah Partai Politik dalam Demokratisasi di Indonesia*, Skripsi, 2003

<sup>36</sup>Masri Singarimbun, dan Sofyan, *Metode Penelitian Survey*, LP3S, Jakarta 1989

- Faktor sejarah kelahiran (*Birth History*)
- Ideologi dan platform partai
- Faktor Kepemimpinan

## 2. Faktor Eksternal

- Isu dan kebijakan politik
- Citra sosial (*social imagery*)
- Citra kandidat/calon anggota legislatif
- Budaya Ketokohan Masyarakat
- Peristiwa mutakhir (*current events*)
- Peristiwa pribadi (*personal events*)
- Perubahan sistem pemilu 2009.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang diamati<sup>37</sup>.

Pemahaman serupa juga diungkapkan oleh Hadari Nawawi yang menyatakan bahwa penelitian deskriptif pada dasarnya digunakan untuk menggambarkan dan melukiskan keadaan subyek dan atau obyek penelitian

---

<sup>37</sup>Lexy Moloeng, 1990. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hal.3

pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya. Penelitian ini akan menggambarkan dan menganalisa Strategi perolehan suara Partai Amanat Nasional di Kota Yogyakarta pada pemilu legislatif 2009<sup>38</sup>. Studi kasus ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa PAN memiliki keunikan tersendiri sebagai partai yang terlahir dari rahim reformasi yang dipelopori oleh Amien Rais, selain itu PAN di Kota Yogyakarta bisa dikategorikan sebagai partai mapan inibisa di;ihat dalam keikutsertaannya dalam 2 kali pemilu yakni 1999 dan 2004 PAN menduduki peringkat kedua setelah PDIP.

## **2. Sumber data**

Data yang penulis gunakan adalah data primer yaitu data yang langsung didapat dari teknik wawancara serta data sekunder yaitu data yang penulis peroleh dari buku-buku, media massa, makalah, dokumen dan media lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian yang penulis lakukan.

## **3. Unit analisa**

Unit analisa dalam penelitian ini adalah partai politik sebagai sebuah institusi politik, dalam hal ini DPD PAN Kota Yogyakarta. Para pengurus maupun kader partai PAN di Kota Yogyakarta menjadi sumber data dalam penelitian ini melalui wawancara (interview) dan DPD PAN Kota Yogyakarta sendiri sebagai sumber data dalam bentuk dokumentasi.

---

<sup>38</sup>Hadari Nawawi, 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal. 63.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data penulis langsung terjun ke lapangan.

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah:

a. Teknik dokumentasi atau studi pustaka

Yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi, teori-teori, serta peraturan dan informasi lain dari buku-buku literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab ke pihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penyelidikan<sup>39</sup>. Dalam memperoleh data penulis secara langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada responden. Adapun objek yang diwawancarai oleh peneliti adalah 5 orang sumber yakni Ir. Muhammad Sofyan Ketua DPD PAN Kota Yogyakarta, M Ali Fahmi SE Ketua DPC PAN Kotagede sekaligus Calon Anggota Legislatif Dapil 5 (Kotagede Umbulharjo), Agung Purnomo Jati Ketua DPD Barisan Muda (BM) PAN Kota Yogyakarta, salah satu tim sukses caleg, dan warga masyarakat.

---

<sup>39</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid II, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1986

### c. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah pengamatan setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran. Dimana observasi disini diartikan lebih sempit, yakni melakukan penglihatan dengan panca indra dengan tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada instansi terkait yakni DPD PAN Kota Yogyakarta.

## **5. Teknik Analisa data**

Analisa data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil pengamatan, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain<sup>40</sup>. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif.

Proses analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah diperoleh dari berbagai sumber. Kemudian dilakukan reduksi data dengan jalan membuat abstraksi. Langkah selanjutnya adalah menyusun data dalam satuan-satuan. Satuan-satuan itu kemudian dikategorisasikan. Tahap terakhir adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah tahap ini selesai, maka baru dilakukan penafsiran data<sup>41</sup>.

---

<sup>40</sup>Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rake Sarasin, 1989, hal 171

<sup>41</sup>Lexy Moloeng, 1990. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya., hal 190